BJ 025479

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTA

TASIKMALAYA

10 • 20 • 30 • 11 • 4 • 00006

BPN RI

BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

BJ 025479

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00006

PROVINSI : JAWA BARAT

~~KABUPATEN~~ / KOTA : TASIKMALAYA

KECAMATAN : PURBARATU

~~DESA~~/ KELURAHAN : PURBARATU

DAFTAR ISIAN 307
No. 10295/2010
DAFTAR ISIAN 208
No. 5587/2010

KANTOR PERTANAHAN
~~KABUPATEN~~ / KOTA
TASIKMALAYA

1	0	•	2	9	•	3	0	•	1	1	•	4	•	0	0	0	0	6

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : **Pakai**
No. : **00006**
~~Desa~~ / Kel. : **Purbaratu**
Tgl. berakhirnya hak :

b) NIB **10.29.30.11.00844**
Letak Tanah
Blok : -

c) ASAL HAK

1. ~~Konversi~~
2. Pemberian hak **Pakai**
3. ~~Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
   Tgl.
   No.
2. Surat Keputusan **Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya**
   Tgl. **18-05-2010**
   No. **67/HP/BPN.32.78/2010**
3. ~~Permohonan Pemecahan~~ / ~~Pemisahan~~ / ~~Penggabungan bidang~~
   Tgl.
   No.

e) SURAT UKUR
Tgl. **21-05-2010**
No. **00002/Purbaratu/2010**
Luas. **3.390 M² (Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi)**

f) NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

~~Tanggal lahir~~ / ~~akta pendirian~~ -

g) PEMBUKUAN

Tasikmalaya , 31- 05- 2010
Kepala Kantor Pertanahan
~~Kabupaten~~ / Kota
Tasikmalaya

ttd

H. A. BUDI RACHMAN, SH
NIP **19540530 198203 1 002**

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Tasikmalaya , 31- 05- 2010
Kepala Kantor Pertanahan
~~Kabupaten~~ / Kota
Tasikmalaya

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

H. A. BUDI RACHMAN, SH
NIP **19540530 198203 1 002**

i) PENUNJUK

Peta : **Lembar :**
DI. 301 No : 4444 Tanggal 19-05-2010
Tanggal berakhirnya hak : selama dipakai/dipergunakan
Apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya pada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya harus dimintakan izin terlebih dahulu kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

BJ 025479

DAFTAR ISIAN 207

10 • 29 • 30 • 11 • 4 • 00006

NIB : 10.29.30.11.00844

SURAT UKUR

Nomor : 00002/Purbaratu/2010

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

~~Kabupaten~~ / Kota : Tasikmalaya

Kecamatan : Purbaratu

~~Desa~~ /Kelurahan : Purbaratu

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Blok

Keadaan Tanah : Sebidang tanah sawah

Tanda-tanda batas : Berupa Patok beton

Luas : 3.390 M^2. (Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : OOH, H. MAHPUD, ABDUL ROSID, IYOH, HOLIK dan HABIB untuk dan atas nama PEMKOT TASIKMALAYA (Pemilik) dan Penetapan batas oleh ENO CHARMANA NIP. 19550614 198003 1 004 (Petugas Ukur)

500

SKALA 1 : .....

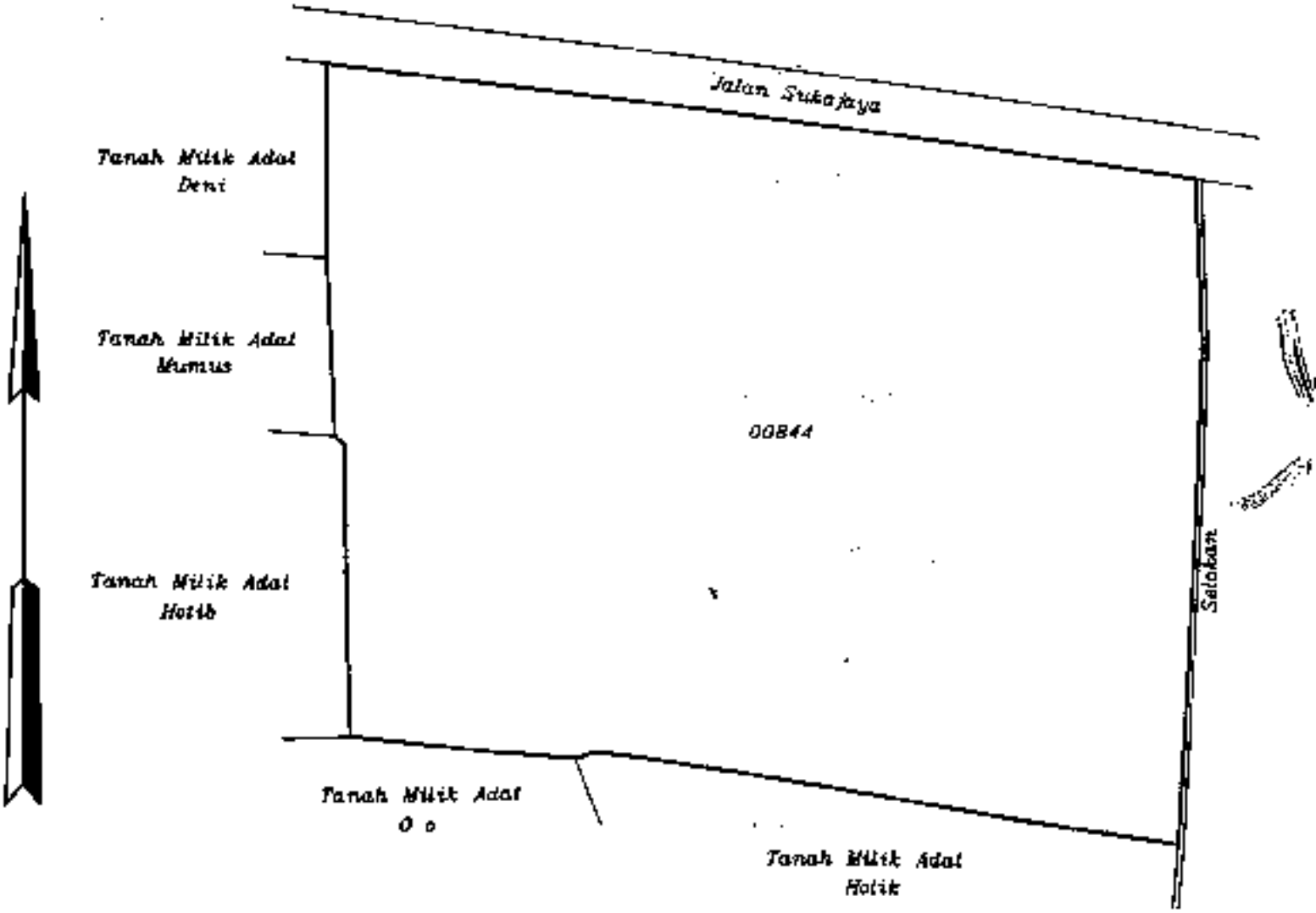

PENJELASAN : ———————— **batas tanah ini**

Hal lain - lain : Surat ukur ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya No. 67/HP/BPN.32.78/2010 tgl.

Daftar Isian 302 tgl. 06-10-2009 No. 3559

Daftar Isian 307 tgl. 04-11-2009 No. 17693

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Petugas Ukur : ENO CHARMANA NIP. 19550614 198003 1 004

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya, 31-05-2010.

Kepala Kantor Pertanahan
~~Kabupaten~~ / Kota
Tasikmalaya

H. A. BUDI RACHMAN, SH
NIP 19540530 198203 1 002

Tasikmalaya, 21 – 05 – 2010

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan
~~Kabupaten~~ / Kota
Tasikmalaya

ttd

H. DEDY OTONG, EZ, BE, SH
NIP 19550125 197903 1 006

Lihat surat ukur Pemisahan / Penggabungan / Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

BPN RI
BHUMIBHAKTI ADHIGUNA

Pasal 36

(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

19 MAY 2010

9990

BPN RI

BHUMIBHAKTI ADHIGUNA